

Matrik : Fokus Program dan Kegiatan Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
1. Penguatan regulasi untuk membangun kerjasama dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.	1. Penyusunan Regulasi Sistem (KODAL) dan Mekanisme Pembagian Peran saat tanggap darurat bencana	1. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Prosedur (Protap) Pembagian Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan saat darurat bencana	1. Terbitnya Peraturan Bupati tentang Prosedur Operasi Standar (POS), Peran dan Fungsi Instansi Pemerintah, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat untuk 5 jenis prioritas ancaman bencana	Instansi Utama : - BPBD - Setdakab (Bag Hukum dan Organisasi) Instansi Terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya yang terkait di Pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	0,250 M
		2. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan Status Bencana	2. Terbitnya Peraturan Bupati yang berisi kriteria tentang status bencana Kabupaten Pidie Jaya	Instansi Utama : - BPBD - Setdakab (Bag Hukum dan Organisasi) Instansi Terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya yang terkait di Pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	0,03 M
		3. Peningkatan mekanisme koordinasi BPBD	3. Terbentuknya unsur pengarah di BPBD.	Instansi Utama : - BPBD - Setdakab (Bag Hukum dan Organisasi) Instansi Terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya yang terkait di Pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	0,7 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
		4. Penyusunan peraturan Bupati tentang Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Pidie Jaya 2012-2017	4. Terbitnya Peraturan Bupati tentang Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Pidie Jaya 2012-2017 5. Terintegrasikannya Zona Prioritas Penanggulangan Bencana ke dalam Qanun Tata Ruang Pidie Jaya.	Instansi Utama : - BPBD - Setdakab (Bag Hukum dan Organisasi) Instansi Terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya yang terkait di Pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	0,01 M
		5. Penyusunan dan penetapan Qanun Penanggulangan Bencana Pidie Jaya	6. Tersusun dan ditetapkannya Qanun Penanggulangan Bencana Pidie Jaya oleh DPRK.	Instansi Utama : - BPBD - Setdakab (Bag Hukum dan Organisasi) Instansi Terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya yang terkait di Pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	0,05 M
	2. Pembangunan Mekanisme Anggaran Partisipatif untuk Penyelenggaraan PB	6. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penganggaran dan Partisipatif Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pidie Jaya	7. Terbitnya Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penganggaran Partisipatif Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pidie Jaya	Instansi Utama : - BPBD - Setdakab (Bag Hukum dan Organisasi) Instansi Terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya yang terkait di Pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	0,01 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
		7. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penggalangan Anggaran/Dana Partisipatif Penanggulangan Bencana	8.Tersusunnya Peraturan Bupati tentang mekanisme penggalangan dana untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.	Instansi Utama : - BPBD - Setdakab (Bag Hukum dan Organisasi) Instansi Terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya yang terkait di Pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	0,01 M
	3. Pembangunan Mekanisme Keterlibatan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan PB	8. Penyusunan Peraturan dan kebijakan tentang Mekanisme Dukungan Partisipasi Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan PB	9.Tersedianya kesepakatan bersama (MOU) terkait program dunia usaha yang dapat meningkatkan ketahanan daerah di zona prioritas.	Instansi Utama : - BPBD - Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Instansi Terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya yang terkait di Pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	0,03 M
2. Pembangunan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan sistem pendukungnya	4. Membangun kapasitas personil PB sesuai dengan kriteria standar yang dibutuhkan	9. Menyusun Kriteria untuk Personil BPBD di tingkat pelaksana, administrasi, pengelola dan pengambil kebijakan	10.Tersedianya Kurikulum Pendidikan Standar PB.	Instansi Utama : - Setdakab (Bag Kepegawaian) Instansi Terkait : - BPBD	0,01 M
		10. Pembangunan mekanisme seleksi khusus personil BPBD	11. Tersedianya peraturan kepala BPBD tentang mekanisme seleksi staf di BPBD.	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Bag Kepegawaian Setdakab	0,01 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
		11. Pelaksanaan Diklat untuk staff BPBD dan KSPBKT berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan	12. Kinerja dan keterampilan staf BPBD dan KSPBKT	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Kantor Diklat	0,1 M
		12. Pelaksanaan latihan dan simulasi internal secara periodik untuk sistem penanggulangan bencana Pidie Jaya	13. Meningkatnya keterampilan teknis BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk dapat mempercepat proses penanganan bencana.	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	0,15 M
		13. Pembentukan Tim Pemantau dan pendamping pelaksanaan PRB Pidie Jaya	14. Terbitnya Surat Keputusan Bupati tentang Tim Pemantau RPB yang melibatkan Forum PRB Pidie Jaya	Instansi Utama : - BPBD - Bag Hukum dan Organisasi Setdakab Instansi Terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya yang terkait di Pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	0,005 M
	5. Peningkatan Sarana dan Prasarana serta logistik kelembagaan PB	14. Pembangunan sarana dan prasarana kelembagaan PB	15. Tersedianya Pusalops di Pidie Jaya	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah Pidie Jaya - Instansi – Instansi Vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,2 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
		15. Pengadaan perangkat dan alat pendukung Pusdalops	16.Tersedianya alat komunikasi dan pengolah data pusdalops dan Posko di Pidie Jaya	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi	1 M
		16. Penataan gudang logistik dan optimalisasi peralatan PB	17.Tertatanya gudang logistic dan teroptimalisasinya peralatan PB	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Instansi – instansi pemerintah lainnya di lingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi – instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,05 M

Matrik : Fokus Program dan Kegiatan Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
1. Penyusunan Rencana Aksi untuk mengurangi Risiko Bencana	1. Penyusunan Rencana Aksi dan kerjasama antar sektor dalam Pengurangan Risiko Bencana Pidie Jaya	1. Penyusunan Rencana Aksi Daerah – Pengurangan Risiko Bencana Pidie Jaya priode 2013-2015 secara partisipatif.	1. Tersedianya rencana aksi daerah yang menjadi pedoman tiap sektor dalam penyusunan program PRB 2. Tersusunnya RAD PRB Pidie Jaya secara partisipatif.	Instansi Utama : - BPBD - Bappeda Instansi Terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah Pidie Jaya - Instansi – instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,3 M
	2. Pengevaluasian dan pembaharuan dokumen RPB Pidie Jaya 2013-2015	2. Perbaikan, penerjemahan dan pembaharuan dokumen RPB Pidie Jaya.	3. Terlaksananya evaluasi RPB Pidie Jaya berjangka waktu 2 tahun sekali atau bila terjadi kejadian bencana besar.	Instansi Utama : - BPBD - Bappeda Instansi Terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	0,2 M
2. Penyusunan Rencana Kontinjensi di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Pidie Jaya	3. Penyusunan Rencana Kontinjensi berdasarkan Kajian Risiko Bencana Pidie Jaya	3. Pembaruan Kajian Risiko Bencana pada Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Pidie Jaya	4. Tersedianya dokumen pembaharuan Zona Prioritas Bencana di Pidie Jaya	Instansi Utama : - BPBD - Bappeda Instansi Terkait : - Instansi-instansi pemerintah yang terkait erat dengan PB di lingkungan Pemerintahan Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	0,05 M
		4. Pendalaman Kajian Risiko Bencana pada Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Pidie Jaya	5. Tersedianya skenario kontinjensi untuk bencana : - Banjir - Gempa Bumi	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Bappeda	0,05 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
			<ul style="list-style-type: none"> - Tsunami - Abrasi dan erosi - Kebakaran - Epidemii pada masing- masing zona prioritas penanggulangan bencana Pidie Jaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Instansi-instansi pemerintah yang terkait erat dengan PRB di lingkungan Pemerintahan Pidie Jaya - Instansi – instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya 	
		5. Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana pada Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Pidie Jaya	6.Tersusunnya Rencana Kontinjensi untuk bencana : <ul style="list-style-type: none"> - Banjir - Gempa Bumi - Tsunami - Abrasi dan erosi - Kebakaran - Epidemii untuk daerah di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Pidie Jaya 	Instansi Utama : <ul style="list-style-type: none"> - BPBD Instansi Terkait : <ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - Instansi-instansi pemerintah yang terkait erat dengan PRB di lingkungan Pemerintahan Pidie Jaya - Instansi – instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya 	0,3 M
	4. Pembangunan Mekanisme Penerapan Rencana Kontinjensi Bersama	6. Pembentukan Tim Gabungan antar kabupaten untuk menyusun Rencana Kontinjensi bersama	7. Tersedianya Tim Pengembangan dan Pembaruan Rencana Kontinjensi Pidie Jaya.	Instansi Utama : <ul style="list-style-type: none"> - BPBD Instansi Terkait : <ul style="list-style-type: none"> - Instansi – instansi pemerintah lainnya di lingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi – instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya 	0,1 M

Matrik : Fokus Program dan Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
1. Pendidikan Kebencanaan di Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal	1. Pembentukan dan Penerapan Kurikulum Pendidikan serta Pelatihan Kebencanaan di Pidie Jaya	1. Pembentukan Tim Gabungan Penyusun Kurikulum Pendidikan Kebencanaan Pidie Jaya	1. Terbentuknya Tim Gabungan Pengembang Kurikulum yang berasal dari guru, praktisi PB dan akademisi	Instansi Utama : - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Instansi Terkait : - BPBD - Instansi – instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,005 M
		2. Penyediaan Kurikulum PRB di Lembaga Pendidikan Formal	2. Tersedianya 287 eks Kurikulum PRB yang terintegrasi dengan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada sekolah: SD, SDLB, MI, SMP, MTs, SMA, SMK dan MA	Instansi Utama : - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga - BPBD Instansi Terkait : - Instansi – instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,3 M
		3. Penerapan Kurikulum PB pada seluruh jenjang Pendidikan Formal	3. Terlaksananya pendidikan kebencanaan yang difokuskan kepada peningkatan keterampilan peserta didik untuk mengurangi risiko bencana	Instansi Utama : - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Instansi Terkait : - BPBD - Kantor Kementerian Agama	0,5 M
		4. Pembentukan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP dan KKG) Kebencanaan	4. Terbentuknya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kebencanaan di sekolah sekolah di Pidie Jaya	Instansi Utama : - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Instansi Terkait : - BPBD - Kantor Kementerian Agama	0,02 M
		5. Pelatihan Guru untuk Materi Ajar Kebencanaan di Sekolah Sekolah	5. Terampilnya guru dalam mengajarkan materi kebencanaan di sekolah : SD, SDLB,	- Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Instansi Terkait : - BPBD	0,5 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
			MI, SMP,MTs, SMA, SMK dan MA	Kantor Kementerian Agama	
		6. Publikasi Peta Risiko Bencana Bencana di Pidie Jaya	6.Tersedianya 1000 lbr Peta Risiko Bencana di Pidie Jaya yang berupa Brosur/buletin yang dapat menjadi referensi untuk sekolah dan masyarakat	Instansi utama - BPBD - Bappeda Instansi terkait : - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga - Kantor Kementerian Agama - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya	0,1 M
		7. Implementasi Program Sekolah Siaga Bencana (SSB)	7.Terbentuknya Sekolah Siaga Bencana pada semua jenjang Pendidikan TK/SD/MI/SMP/MTs SMA/SMK/MA pada daerah yang rawan bencana.	Instansi Utama: - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Instansi Terkait : - BPBD - Kantor Kementerian Agama	0,3 M
	2. Pendidikan Non Formal	8.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya untuk Pendidikan Kebencanaan Non Formal	8.Pelatihan untuk 100 tokoh masyarakat dan relawan PB di Pidie Jaya	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Instansi – instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,2 M
		9. Pelatihan dan Simulasi penggunaan teknologi dan peralatan Penanggulangan Bencana	9. Tersedianya 100 tenaga terampil dalam PB yang mempunyai keterampilan dalam penggunaan teknologi dan peralatan PRB	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Instansi – instansi pemerintah lainnya di lingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi – instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,1 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
	3.Internalisasi Kearifan Lokal dan Ketangguhan Masyarakat Pidie Jaya menghadapi bencana	10. Penyusunan dan pembaruan materi pembelajaran ketangguhan masyarakat Pidie Jaya menghadapi Bencana	10.Tersusunnya materi pembelajaran non Formal untuk masyarakat di zona prioritas PRB	Instansi Utama : - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Instansi Terkait : - BPBD	0,1 M
		11. Penyebaran Informasi/ Kampanye Ketangguhan Masyarakat Pidie Jaya terhadap Bencana pada Peserta Didik	11.Terjaminnya informasi kebencanaan di peserta didik yang bisa dicapai dengan komunikasi dua arah.	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi	0,05 M
		12. Penerbitan Jurnal Hasil Inventarisir Kearifan Lokal Masyarakat Pidie Jaya Menghadapi Bencana	12.Tersedianya Jurnal tentang Kearifan lokal dan Ketahanan Masyarakat Pidie Jaya menghadapi bencana	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi	0,05 M
		13. Pengadopsian Kearifan Lokal ke dalam Sistem Penanggulangan Bencana Pidie Jaya	13.Teradopsinya 5 kearifan lokal pada masyarakat di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Pidie Jaya	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Instansi – instansi pemerintah lainnya di lingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi – instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,1 M
2.Peningkatan Kemitraan Pemerintah dan non Pemerintah dalam Pengembangan Teknologi Kebencanaan	4. Peningkatan Kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan forum PRB dalam Penelitian Kebencanaan.	14. Penyusunan mekanisme kerjasama secara partisipatif dalam penelitian kebencanaan	14. Terkoordinasinya kegiatan penelitian kebencanaan.	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah Pidie Jaya	0,1 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
serta Peningkatan Kapasitas Penelitian Internal Pemerintah				- Instansi – instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	
	5. Penggalangan Anggaran Penelitian Mitigasi dan Sistem Peringatan Dini Bencana.	15. Pengadaan Dukungan Penggalangan Anggaran Kebutuhan Penelitian Mitigasi dan Sistem Peringatan Dini bagi Forum PRB Pidie Jaya	15. Tersedianya anggaran penelitian yang memadai terhadap penelitian mitigasi dan Sistem Peringatan Dini	Instansi Utama : - Bappeda - BPBD Instansi Terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah Pidie Jaya - Instansi – instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,15 M
	6. Pemberdayaan Kapasitas Internal Pemerintah untuk Penelitian Kebencanaan	16. Penerapan Hasil Penelitian Kebencanaan dalam PRB Pidie Jaya	16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikembangkan dan diaplikasikan untuk 9 ancaman bencana	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah Pidie Jaya - Instansi – instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,1 M
	7. Pemantauan efektifitas upaya Pengurangan Risiko Bencana di Pidie Jaya	17. Penerapan Mekanisme Analisis Risiko Bencana bagi Proyek Pembangunan Berskala Besar	17. Terbitnya formulir kajian analisis risiko bencana. 18. Terjaminnya investasi pembangunan.	Instansi Utama : - Bapedal - BPBD Instansi Terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah Pidie Jaya - Instansi – instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,1 M
		18. Penerbitan Rasio Investasi dan Biaya Pemulihan Dampak Bencana	19. Terbitnya Rasio Investasi dan Biaya Pemulihan	Instansi Utama : - Bappeda - BPBD	0,1 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
				Instansi Terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah Pidie Jaya - Instansi – instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	

Matrik : Fokus Program dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
1. Pembangunan Sistem Distribusi Logistik untuk Kebutuhan Tanggap Darurat	1. Penjaminan Stabilitas Harga Kebutuhan Penanganan Darurat	1. Penyusunan kontrak kerjasama antara pemerintah Pidie Jaya dengan produsen-produsen kebutuhan pokok	1. Terjaminnya kebutuhan darurat saat terjadi bencana dengan jumlah yang cukup. 2. Adanya kontrak yang disepakati bersama antara pemerintah Pidie Jaya dan produsen	Instansi Utama : - Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Koperasi Instansi Terkait : - BPBD - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan	0,05 M
	2. Pembangunan fasilitas pendukung Sistem Distribusi Logistik di Zona Prioritas PB Pidie Jaya	2. Pembangunan jalur distribusi logistik daerah dari produsen hingga masyarakat	3. Diterimanya barang bantuan dari produsen induk ke tangan masyarakat penerima manfaat.	Instansi Utama : - Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Koperasi Instansi Terkait : - BPBD - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan	0,1 M
		3. Pembangunan Pos KODAL Lapangan di Zona Prioritas PRB Pidie Jaya	4. Adanya <i>bufferstock</i> di setiap zona prioritas PRB Pidie Jaya	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Instansi – instansi pemerintah lainnya di lingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi – instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,5 M
2. Pendayagunaan Hasil Penelitian Inovasi Teknologi dalam Penanggulangan Bencana	3. Penggunaan hasil Penelitian Inovasi Teknologi untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4. Pengintegrasian Hasil Penelitian Kebencanaan dalam Kehidupan Masyarakat	5. Terpahaminya dan diterapkan hasil penelitian untuk pengurangan risiko bencana oleh masyarakat Pidie Jaya	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Instansi – instansi pemerintah lainnya di lingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi – instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,1 M
		5. Pendayagunaan	6. Terampilnya anggota	Instansi Utama :	0,2 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
		Teknologi pada operasionalisasi TRC	Tim Reaksi Cepat dalam melakukan upaya tanggap darurat.	- BPBD Instansi Terkait : - Instansi – instansi pemerintah lainnya di lingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi – instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	
	4.Sentralisasi Informasi Kebencanaan	6.Pembangunan Pusat Informasi Kebencanaan BPBD	7.Tersedianya 1 sumber informasi Kebencanaan skala Kab. Pidie Jaya	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Bappeda - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi	0,5 M
		7.Pembangunan Jaringan Informasi Kebencanaan Terpusat	8.Adanya jaringan informasi kebencanaan dari satu sumber informasi	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Instansi – instansi pemerintah lainnya di lingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi – instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,1 M
		8. Aktivasi Jaringan Informasi Kebencanaan Terpusat pada Fasilitas Publik	9.Berfungsinya jaringan informasi terpusat pada fasilitas publik yang ada	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Instansi – instansi pemerintah lainnya di lingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi – instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,05 M
3. Pengembangan Program Pemerintah untuk Pengentasan Kemiskinan secara sektoral di Zona Prioritas PB Pidie Jaya	5. Pengentasan Kemiskinan di Zona Prioritas PB Pidie Jaya	9. Penetapan Sektor-Sektor Pengembangan Mata Pencarian Alternatif masyarakat di Zona Prioritas PB Pidie Jaya	10.Adanya peta sektoral pengembangan mata pencarian alternatif di Zona Prioritas PB Pidie Jaya yang disepakati seluruh pemangku kepentingan	Instansi Utama : - BPM - Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Instansi Terkait : - BPBD - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,025 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
				<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pertanian dan Peternakan - Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM - Dinas Kehutanan dan Perkebunan 	
		10.Pelatihan Sektoral Keterampilan Pengembangan Mata Pencarian Alternatif di Zona Prioritas PRB Pidie Jaya	11.Terselenggaranya pelatihan-pelatihan keterampilan oleh lembaga pelatihan masyarakat yang ada di Zona Prioritas PRB Pidie Jaya	Instansi Utama : <ul style="list-style-type: none"> - BPM - Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Instansi Terkait : <ul style="list-style-type: none"> - BPBD - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Pertanian dan Peternakan - Dinas Perindustrian dan Koperasi - Dinas Kehutanan dan Perkebunan 	0,2 M
		11.Pemberian modal dan insentif bergilir untuk pengembangan Mata Pencarian Alternatif di Zona Prioritas PRB Pidie Jaya	12.Terselenggaranya permodalan bergilir dan berkelanjutan kepada masyarakat pengguna bantuan di Zona Prioritas PRB Pidie Jaya	Instansi Utama : <ul style="list-style-type: none"> - BPM Instansi Terkait : <ul style="list-style-type: none"> - BPBD - Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Pertanian dan Peternakan - Dinas Perindustrian dan Koperasi - Dinas Kehutanan dan Perkebunan 	1 M
	6.Pengembangan Mata Pencarian Alternatif Berdasarkan Peta Sektor Pengentasan Kemiskinan di Zona Prioritas PRB Pidie Jaya	12.Pembangunan Jaringan Pemasaran Produk Mata Pencarian Alternatif Masyarakat rentan Di Zona Prioritas PRB Pidie Jaya	13.Terjaminnya mata pencarian alternatif masyarakat rentan yang berkelanjutan di di Zona Prioritas PRB Pidie Jaya.	Instansi Utama : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Koperasi Instansi Terkait : <ul style="list-style-type: none"> - Instansi – instansi pemerintah lainnya di lingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi – instansi vertical lainnya di wilayah Pidie Jaya 	0,15 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
		13.Adaptasi teknologi pengembangan lanjutan usaha masyarakat.	14.Tersedianya teknologi tepat guna untuk peningkatan kualitas produksi masyarakat.	Instansi Utama : - BPM - Dinas Perindustrian dan Koperasi Instansi Terkait : - Instansi – instansi pemerintah lainnya di lingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi – instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,25 M
		14.Pengembangan usaha masyarakat dengan inovasi teknologi di Zona Prioritas PRB Pidie Jaya	15.Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi tepat guna 16.Terjaminnya produk masyarakat laku di pasaran	Instansi Utama : - Dinas Perindustrian dan Koperasi Instansi Terkait : - Instansi – instansi pemerintah lainnya di lingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi – instansi vertical lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,15 M
		15.Penerapan sistem pembinaan oleh Perusahaan Besar terhadap usaha masyarakat	17. Tersalurnya produk usaha masyarakat di perusahaan-perusahaan besar. 18. Adanya produk masyarakat yang terpakai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan besar.	Instansi Utama : - Dinas Perindustrian dan Koperasi - BPM Instansi Terkait : - Instansi – instansi pemerintah lainnya di lingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi – instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0.05 M
4. Pengembangan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Risiko Bencana	7. Peningkatan Peran Lembaga Adat,Tokoh Agama / Masyarakat	16. Pelatihan dan Sosialisasi Kebencanaan dalam perpektif adat dan agama.	19.Tersedianya Tokoh Adat Pidie Jaya yang siap mengayomi masyarakat dalam menghadapi bencana sesuai dengan adat dan budaya setempat	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Kantor Kementerian Agama - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah	0,15 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
			20. Tersedianya Ulama Pidie Jaya yang siap mengayomi masyarakat dalam menghadapi bencana sesuai kaidah agama	Pidie Jaya	
		17. Penguatan peran media dalam menumbuhkan budaya kesiapsagaan untuk mendorong partisipasi masyarakat	21. Minimal 50 wartawan di Pidie Jaya mendapat pelatihan PRB	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,15 M
	8. Pengembangan program PRB berbasis masyarakat	18. Pendampingan dan pengorganisasian Kelompok Siaga Bencana di Zona Prioritas PRB Pidie Jaya	22. Berlanjutnya Kegiatan PRBBK oleh Komite Siaga Bencana di Gampong- Gampong di Zona Prioritas PRB	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan - BPM	0,25 M
		19. Pengurangan risiko dan kesiapsiagaan spesifik untuk kaum perempuan, anak- anak dan kelompok marginal	23. Meningkatnya kapasitas kaum perempuan, anak- anak dan kelompok marginal dalam menghadapi bencana di zona prioritas PRB Pidie Jaya.	Instansi Utama : - Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Instansi Terkait : - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - BPBD - BPM	0.25 M

Matrik : Fokus Program dan Kegiatan Perlindungan Masyarakat Bencana Banjir

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
1. Pencegahan dan Mitigasi	1. Penegakan Aturan Terkait Pengurangan Risiko Bencana	1. Penegakan Peraturan Lingkungan Hidup terkait pencegahan bencana banjir	1. Berkurangnya alih fungsi lahan pada daerah kawasan resapan (hutan, DAS, hutan kota, taman kota, waduk, situ, dll) 2. Berkurangnya aktifitas ilegal di kawasan hutan 3. Berfungsinya lembaga adat untuk pengawasan fungsi hutan di 5 Kecamatan pada zona prioritas PRB banjir	Instansi Utama: - Dishutbun Instansi terkait: - BPBD - Bappeda Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0.02 M
	2. Pembangunan Infrastruktur	2. Peningkatan Kapasitas Daerah Resapan di Zona Prioritas PRB Banjir	4. Ditanamnya 1.000 batang tanaman keras yang produktif per tahun di zona prioritas banjir	Instansi Utama - Dinas Kehutanan dan Perkebunan Instansi terkait: - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0.1 M
		3. Pembangunan Sumur Resapan sesuai dengan Standar Di Kantor Pemerintahan	5. Setiap kantor pemerintahan yang berada di daerah banjir memiliki sumur resapan sesuai dengan standar nasional.	Instansi Utama : - Seluruh SKPD dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Instansi Terkait : - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0.5 M
		4. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir di Zona Prioritas PRB Banjir	6. Terbangunnya infrastruktur pengendalian banjir sepanjang 5 km di zona prioritas banjir	Instansi Utama : - Dinas PU Instansi Terkait : - Bappeda	3 M
		5. Pembangunan Saluran Pembuang di Zona	7. Terbangunnya 1 km saluran pembuang di	Instansi Utama : - Dinas PU	1 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
		Prioritas PRB Banjir	zona prioritas banjir	Instansi Terkait : - Bappeda	
		6. Pembangunan Tanggul Pengaman Banjir	8. Terbangunnya 1 km tanggul pengaman banjir di zona prioritas banjir	Instansi Utama : - Dinas PU Instansi Terkait : - Bappeda	1 M
		7. Pembangunan Pintu Air (pintu Klep) dan Pompanisasi pada daerah yang elevasinya lebih rendah dari lokasi buangan.	9. Terbangunnya 3 pintu air dan pompanisasi di zona prioritas banjir	Instansi Utama : - Dinas PU Instansi Terkait : - Bappeda	3 M
		8. Normalisasi Sungai	10. Dilakukannya pembersihan DAS minimal 2 kali/tahun di Zona Prioritas PRB Banjir	Instansi Utama : - Dinas PU Instansi Terkait : - Bappeda	0.5 M
2. Kesiapsiagaan	3. Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana di Zona Prioritas Banjir	9. Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir	11. Disampaikannya peringatan awal potensi banjir berdasarkan prakiraan paling lambat 1x24 jam sebelum kejadian 12. Disebarkannya peringatan evakuasi banjir berdasarkan ketinggian muka air sungai paling lambat 30 menit sebelum landaan banjir bandang tiba di pemukiman di hulu DAS	Instansi Utama: - Dinas PU - BPBD Instansi terkait: - Bappeda - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan telekomunikasi - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0.3 M
	4. Peningkatan Kapasitas Evakuasi Masyarakat	10. Penyusunan dan Penetapan Rencana Evakuasi di Zona Prioritas Banjir	13. Tersusunnya Rencana Evakuasi Banjir	Instansi Utama : - BPBD Instansi terkait	0.05 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
				<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya 	
	5.Gladi dan Simulasi Sistem Peringatan Dini dan Evakuasi	11.Gladi Posko Berkala Prosedur Operasi Standar Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Banjir	14.Satu kali setahun terselenggara gladi posko berdasarkan POS penanganan bencana banjir	Instansi Utama : <ul style="list-style-type: none"> - BPBD Instansi terkait : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas PU - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya 	0,1 M
		12.Simulasi Evakuasi Masyarakat terhadap Bencana Banjir	15.Diadakannya simulasi evakuasi dan tanggap darurat antara masyarakat dan pemerintah minimal satu tahun sekali.	Instansi Utama : <ul style="list-style-type: none"> - BPBD Instansi terkait : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas PU - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan olah raga - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya 	0,115 M
3. Penanganan Bencana	6.Tanggap Darurat	13.Kajian Cepat Bencana Banjir	16. Ditetapkannya status darurat bencana maksimal 1x3 jam	Instansi Utama : <ul style="list-style-type: none"> - BPBD (TRC) 	0,2 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
			sejak bencana selesai	Instansi terkait : - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	
		14.Pencarian, penyelamatan dan evakuasi	17.Maksimum 1x3 jam setelah kejadian bencana selesai telah memulai pelaksanaan tugas 18. Maksimum 3x24 jam setelah kejadian bencana selesai, telah selesai mengirim semua korban selamat ke pusat kesehatan /pengungsian 19.Maksimum 7x24 jam setelah kejadian bencana selesai, telah selesai melaksanakan penguburan seluruh jenazah	Instansi Utama : - BPBD Instansi terkait : - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi - Dinas PU - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,5 M
		15.Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi	20.Maksimum 1x24 jam setelah kejadian bencana selesai, logistik dasar telah sampai ke seluruh titik pengungsian	Instansi Utama : - Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Instansi terkait : - BPBD - Dinas Kesehatan - Dinas PU - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi	1 M
		16.Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis	21.Maksimum 1x24 jam setelah kejadian bencana selesai, telah	Instansi Utama : - Dinas PU	3M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
			diketahui status seluruh fasilitas kritis yang ada di daerah bencana 22.Maksimum 7x24 jam setelah kejadian bencana selesai, telah dapat memfungsikan fasilitas kritis yang rusak.	Instansi terkait : - BPBD - Dinas Kesehatan - Dinas PU - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga - Dinas Perindustrian dan Koperasi - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	
	7.Rehabilitasi dan Rekontruksi	17.Pengkajian Kerusakan dan Kerugian	23.Maksimal 10 hari setelah dikeluarkannya status darurat bencana telah dimiliki hasil perhitungan kerusakan dan kerugian (<i>Damage and Losess Assessment = DALA</i>).	Instansi Utama : - BPBD - BAPPEDA Instansi terkait - Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan - Dinas PU - DPKKD - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi	0,1 M
		18. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	24.Perencanaan selesai paling lama 14 hari setelah ditetapkannya status darurat bencana	Instansi Utama : - BPBD - Bappeda Instansi terkait - Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi - Dinas PU	0,1 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
				<ul style="list-style-type: none"> - DPKKD - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga - Dinas Perindustrian dan Koperasi - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya - Dinas Pertanian dan Peternakan - Dinas Perkebunan dan Kehutanan - Dinas Kelautan dan Perikanan - Kapedal 	
		19. Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana	24. Terselenggaranya Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi paling lama 6 bulan setelah kejadian bencana	Instansi Utama : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas PU - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan olah raga - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Instansi terkait <ul style="list-style-type: none"> - BPBD - Bappeda - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya 	5 M
		20. Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis	25. Normalisasi kehidupan masyarakat korban selamat paling lama 6 bulan setelah kejadian bencana	Instansi Utama : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan Instansi terkait <ul style="list-style-type: none"> - BPBD - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya 	2 M

Matrik : Fokus Program dan Kegiatan Perlindungan Masyarakat untuk Mitigasi Bencana Tsunami

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
1. Mitigasi Tsunami	1.Pembangunan dan Pengembangan Publikasi Teknologi Pendeteksi Tsunami	1.Mengembangkan Kapasitas untuk Memperkuat Sistem Deteksi Dini Tsunami	1.Diterapkannya hasil penelitian SPD Tsunami di zona prioritas PRB tsunami Pidie Jaya 2.Tidak ada penambahan pembangunan fasilitas umum di daerah potensi landaan tsunami	Instansi utama - Bappeda - Dinas Kelautan dan Perikanan Instansi terkait - BPBD - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,2 M
		2.Pembangunan Peredam Tekanan Gelombang di zona prioritas PRB tsunami Pidie Jaya	3.Terbangunnya peredam tekanan gelombang di Zona Prioritas PRB Tsunami Pidie Jaya	Instansi Utama : - Dinas PU Instansi terkait - BPBD - Bappeda	1 M
2. Kesiapsiagaan	2.Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana	3.Pemeliharaan tempat/ Gedung Penyelamatan / Pengungsian (<i>escape building</i>) untuk masyarakat di Zona Prioritas PRB Tsunami Pidie Jaya	4.Tersedianya data verifikasi bangunan publik yang dapat difungsikan sebagai gedung penyelamatan. 5.Adanya status pengelolaan yang jelas untuk tempat penyelamatan di Zona Prioritas PRB Pidie Jaya.	Instansi utama : - BPBD - DPKKD Instansi terkait: - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,5 M
		4.Peningkatan Kapasitas Prasarana dan Sarana Evakuasi Masyarakat pada Zona Prioritas PRB Tsunami Pidie Jaya	6.Terbangunnya jalur evakuasi baru minimal 5 km 7.Pemeliharaan jalur evakuasi minimal 5 km.	Instansi Utama : - Dinas PU - BPBD Instansi terkait - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,5 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
	2.Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana di Zona Prioritas PB Tsunami Pidie Jaya	5.Pembangunan Sistem Peringatan Dini Multi Bencana	8.Berfungsinya minimal 10 mesjid per kecamatan di Zona Prioritas PB Tsunami Pidie Jaya sebagai fasilitas penyebaran arahan 9.Beroperasinya 10 sirene peringatan dini tsunami di Zona Prioritas PRB Tsunami Pidie Jaya 10.Adanya 2 frekuensi khusus yang dapat digunakan pada saat darurat bencana	Instansi utama: - BPBD - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan telekomunikasi Instansi terkait: - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,5 M
	3.Peningkatan Kapasitas Evakuasi Masyarakat	6.Penyusunan dan Penetapan Rencana Evakuasi di Zona Prioritas PRB Tsunami Pidie Jaya	11.Adanya Pergub tentang standar umum penyusunan rencana evakuasi 12.Tersusunnya rencana evakuasi tsunami Pidie Jaya.	Instansi Utama: - BPBD - Setdakab bag Hukum dan Humas Instansi terkait: - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,05 M
	4.Gladi dan Simulasi Sistem Peringatan Dini dan Evakuasi Masyarakat	7.Gladi Posko Berkala Prosedur Operasi Standar Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Tsunami	13.Diadakannya Gladi Posko Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami minimal sekali setahun.	Instansi Utama : - BPBD Instansi terkait : - Dinas PU - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan olah raga - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi - Instansi-instansi vertikal lainnya	0,1 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
		8.Simulasi Evakuasi Masyarakat terhadap Bencana Tsunami	14.Diadakannya simulasi evakuasi dan tanggap darurat antara masyarakat dan pemerintah minimal satu tahun sekali.	Instansi Utama : - BPBD Instansi terkait : - Dinas PU - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,115 M
3.Penanganan Bencana	5.Tanggap Darurat	9.Kajian Cepat Bencana tsunami	15.Tersedianya hasil kajian cepat dan rekomendasi status darurat bencana maksimal 1x 24 jam sejak kejadian bencana	Instansi Utama : - BPBD (TRC) Instansi terkait : - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,2 M
		10.Pencarian, penyelamatan dan evakuasi	16.Maksimum 1x6 jam setelah kejadian bencana telah memulai pelaksanaan tugas 17.Maksimum 3x24 jam setelah kejadian bencana, telah selesai melakukan evakuasi semua korban selamat ke pusat kesehatan 18.Maksimum 7x24 jam setelah kejadian bencana, telah selesai melaksanakan penguburan seluruh jenazah	Instansi Utama : - BPBD Instansi terkait : - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi - Dinas PU - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,5 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
		11. Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi	19. Maksimum 2x24 jam setelah kejadian bencana, logistik dasar telah sampai ke seluruh titik pengungsian	Instansi Utama : - Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Instansi terkait : - BPBD - Dinas Kesehatan - Dinas PU - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi	1 M
		12. Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis	20. Maksimum 1x24 jam setelah kejadian bencana selesai, telah diketahui status seluruh fasilitas kritis yang ada di daerah bencana 22. Maksimum 7x24 jam setelah kejadian bencana selesai, telah dapat memfungsikan fasilitas kritis yang rusak.	Instansi Utama : - Dinas PU Instansi terkait : - BPBD - Dinas Kesehatan - Dinas PU - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga - Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Koperasi - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	1 M
	6. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	13. Pengkajian Kerusakan dan Kerugian	23. Maksimal 10 hari setelah dikeluarkannya status darurat bencana telah dimiliki hasil perhitungan kerusakan dan kerugian (<i>Damage and Loss Assessment = DALA</i>).	Instansi Utama : - BPBD - BAPPEDA Instansi terkait - Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan - Dinas PU - DPKKD - Dishubtel	0,1 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
		14. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	24. Perencanaan selesai paling lama 14 hari setelah ditetapkan status darurat bencana	Instansi Utama : - BPBD - Bappeda Instansi terkait - Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi - Dinas PU - DPKKD - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga - Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Koperasi - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya - Dinas Pertanian dan Peternakan - Dinas Perkebunan dan Kehutanan - Dinas Kelautan dan Perikanan	0,1 M
		15. Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana	25. Terselenggaranya Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi paling lama 6 bulan setelah kejadian bencana	Instansi Utama : - Dinas PU - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan olah raga - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Instansi terkait - BPBD - Bappeda - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Aceh	5 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
		16. Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis	26. Normalisasi kehidupan masyarakat korban selamat paling lama 6 bulan setelah kejadian bencana	Barat - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya Instansi Utama : - Dinas Kesehatan Instansi terkait - BPBD - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	2 M

Matrik : Fokus Program dan Kegiatan Perlindungan Masyarakat Bencana Kebakaran

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
1.Pencegahan dan Mitigasi	1.Penegakan Aturan Terkait Pengurangan Risiko Bencana	1. Penguatan Aturan Tata Ruang dan Pengembangan di Kawasan Domestik dan Industri	1.Pemberlakuan aturan standar aksesibilitas pemadam kebakaran pada daerah domestik, hotel dan kawasan industri yang baru dibangun 2.Terawasinya hutan dan lahan yang mudah terbakar	Instansi Utama: - KLH - Bappeda - BPBD Instansi terkait : - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Aceh - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Aceh	0,05 M
		2.Penyusunan qanun tentang penanggulangan bencana kebakaran	3.Tersusunnya qanun tentang penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Pidie Jaya	Instansi Utama: - BPBD - Bagian hukum dan humas (Setdakab) Instansi terkait: - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Barat - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Kabupaten Pidie Jaya	0.05 M
	2. Penyediaan UPTD penanggulangan kebakaran	3.Pembangunan UPTD penanggulangan kebakaran pada dua wilayah zona prioritas kebakaran	4.Terbangunnya UPTD di tiga wilayah manajemen kebakaran (Kec. Bandar Baru, Meureudu dan Bandar Dua)	Instansi Utama : - DPKKD - BPBD Instansi terkait : - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	1 M
	3.Pembangunan infrastruktur dan kapasitas sumber daya masyarakat	4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan UPTD Penanggulangan kebakaran	5.Tersedianya dua unit mobil pemadam serta kebutuhan pendukung lainnya 6.Terwujudnya Waktu	Instansi Utama : - DPKKD - BPBD Instansi terkait : - Instansi-instansi lainnya	2 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
			Respon Pasukan Pemadam Kebakaran paling lama 30 menit setelah pengaduan masyarakat diterima	dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	
		5.Perekrutan dan pelatihan personil pemadam dan relawan untuk di tempatkan di setiap UPTD	7.Tersedianya dan terlatihnya 20 personil di tiga UPTD 8.Terbentuknya 1 (satu) kelompok masyarakat/relawan yang peduli bencana kebakaran di setiap daerah rawan bencana kebakaran	Instansi Utama : - BPBD Instansi terkait : - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,25 M
2.Kesiapsiagaan	4.Peningkatan Kapasitas Evakuasi Masyarakat di Zona Prioritas Kebakaran	6. Penyusunan dan Penetapan Rencana Evakuasi di Zona Prioritas Kebakaran	9.Tersusunnya dan ditetapkannya Rencana Evakuasi Kebakaran	Instansi Utama : - BPBD Instansi terkait - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,05 M
		7.Simulasi Evakuasi Masyarakat terhadap Bencana Kebakaran	10.Dilaksanakannya latihan bersama kebakaran 2 kali setahun bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan.	Instansi Utama : - BPBD Instansi terkait - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0.2 M
3. Penanganan Bencana	5. Tanggap Darurat	8.Kajian Cepat Bencana kebakaran	11.Personil penanganan bencana kebakaran telah tiba dilokasi kejadian paling lama 30 menit setelah laporan kejadian yang	Instansi Utama : - BPBD Instansi terkait : - instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya	0.02M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
			diverifikasi. 12. Adanya laporan awal dampak kerugian	- instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Kabupaten Pidie Jaya	
		9. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi	13. Evakuasi manusia dan asset asset strtegis. 14. Lokalisasi dampak kejadian, hingga tidak terjadi penyebaran kebakaran	Instansi Utama : - BPBD Instansi terkait - instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya - instansi-instansi vertikal lainnya di	0.05 M
		10. Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi	15. Maksimum 1x24 jam setelah kejadian bencana selesai, logistik dasar telah sampai ke seluruh titik pengungsian	Instansi Utama : - Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Instansi terkait : - BPBD - Dinas Kesehatan - Dinas PU - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi	1 M
	5. Rehabilitasi dan Rekontruksi	11. Pengkajian Kerusakan dan Kerugian	16. Maksimal 10 hari setelah dikeluarkannya status darurat bencana telah dimiliki hasil perhitungan kerusakan dan kerugian (<i>Damage and Losses Assessment = DALA</i>).	Instansi Utama : - BPBD - BAPPEDA Instansi terkait - Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan - Dinas PU - DPKKD - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi	0,1 M
		12. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi	17. Perencanaan selesai paling lama 14 hari	Instansi Utama : - BPBD	0,1 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
		dan Rekonstruksi	setelah ditetapkan status darurat bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - Instansi terkait - Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi - PU - DPKKD - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya 	
		13. Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana	18. Terselenggaranya Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi paling lama 6 bulan setelah kejadian bencana	Instansi Utama : <ul style="list-style-type: none"> - PU - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan Instansi terkait <ul style="list-style-type: none"> - BPBD - Bappeda - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya 	5 M

Tabel 5.8, Fokus Program dan Kegiatan Perlindungan Masyarakat Bencana Gempa Bumi

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
1. Pencegahan dan Mitigasi	3. Penegakan Aturan Terkait Pengurangan Risiko Bencana	1. Penyusunan dan percepatan penerapan aturan ' <i>Building Code</i> ' di Pidie Jaya	1. Memasukkan ' <i>Building Code</i> ' dalam koefisien kegunaan bangunan dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2. 60% Penerbitan IMB Bangunan baru berdasarkan <i>Building Code</i> 3. Sosialisasi kepada 10 Badan asosiasi perencanaan terkait penggunaan material bangunan tahan gempa. 4. Kajian detail ilmiah skala 1:5.000 di zona prioritas bencana	Instansi utama: - Dinas PU Instansi terkait: - Setdakab bag hkum dan humas - BPBD - Dinas Pertambangan, Industri, Koperasi dan UKM - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,025 M
		2. Pengawasan Ketahanan Bangunan di Kabupaten Pidie Jaya	5. Terjaminnya Bangunan tahan gempa, di zona perioritas gempa bumi.	Instansi Utama: - Bappeda - Dinas PU Instansi terkait: - BPBD - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,1 M
		3. Publikasi Panduan Rumah Aman Gempa bumi	6. Adanya 1 kali penerbitan khusus per tahun publikasi rumah tahan gempa di 1 media massa. 7. Adanya 500 poster KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dan promosi Rumah Aman	Instansi Utama : - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi - BPBD Instansi Pendukung : - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di	0,055 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
			Gempa.	wilayah Pidie Jaya.	
2.Kesiapsiagaan	2. Peningkatan Kapasitas Evakuasi Masyarakat dan Kesiapan Aparatur Gampong di zona prioritas PRB	4.Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Diri saat terjadi bencana	8. Tersedianya poster standar panduan penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi ukuran A3 di setiap bangunan pemerintah di Zona Prioritas PRB Pidie Jaya	Instansi Utama : - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi - BPBD Instansi Pendukung : - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya.	0,05 M
		5.Pembangunan Jaringan Informasi Kebencanaan Terpusat dengan memanfaatkan fasilitas publik sebagai <i>interface</i>	9.Adanya 100 fasilitas publik terhubung langsung dengan Pusat Informasi Pusdalops PRB Pidie Jaya 10.Adanya kesepakatan antara pemerintah dengan 3 perusahaan telpon seluler untuk menyebarkan SMS yang berisi informasi gempa bumi	Instansi Utama : - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi - BPBD Instansi Pendukung : - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya. - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,05 M
	3.Peningkatan kesiapsiagaan di sekolah	6.Mengadakan simulasi terhadap gempa bumi.	12.Dilakukannya simulasi gempa bumi pada setiap sekolah – sekolah dan instansi pemerintah minimal 1 tahun 2 kali kegiatan. 13.Dan juga melakukan simulasi arah tujuan lalu lintas yang harus di lalui untuk mengefakuasi korban gempa bumi jika sewaktu – waktu terjadinya tsunami.	Instansi Utama : - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga Instansi terkait : - BPBD - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,05 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
3. Penanganan Bencana	4. Tanggap Darurat	7. Kaji Cepat Bencana	14. Tersedianya hasil kajian cepat dan rekomendasi status darurat bencana maksimal 1x 24 jam sejak kejadian bencana	Instansi Utama : - BPBD (TRC) Instansi terkait : - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,2 M
		4. Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi	15. Maksimum 1x6 jam setelah kejadian bencana telah memulai pelaksanaan tugas 16. Maksimum 3x24 jam setelah kejadian bencana, telah selesai melakukan evakuasi semua korban selamat ke pusat kesehatan 17. Maksimum 7x24 jam setelah kejadian bencana, telah selesai melaksanakan penguburan seluruh jenazah	Instansi Utama : - BPBD - Kantor SAR Instansi terkait : - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi - Dinas PU - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,5 M
		9. Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi	18. Maksimum 2x24 jam setelah kejadian bencana, logistik dasar telah sampai ke seluruh titik pengungsian	Instansi Utama : - Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Instansi terkait : - BPBD - Dinas Kesehatan - Dinas PU - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi	1 M
		10. Pemulihan darurat fungsi prasarana dan	19. Maksimum 1x24 jam setelah kejadian	Instansi Utama : - Dinas PU	1 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
		sarana kritis	bencana, telah diketahui status seluruh fasilitas kritis yang ada di daerah bencana 20.Maksimum 7x24 jam setelah kejadian bencana, telah dapat memfungsikan fasilitas kritis yang rusak (baik secara permanen ataupun temporer).	Instansi terkait : - BPBD - Dinas Kesehatan - Dinas PU - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga - Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Koperasi - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	
	5.Rehabilitasi dan Rekontruksi	11.Pengkajian Kerusakan dan Kerugian	21.Maksimal 10 hari setelah dikeluarkannya status darurat bencana telah dimiliki hasil perhitungan kerusakan dan kerugian (<i>Damage and Losess Assessment = DALA</i>).	Instansi Utama : - BPBD - BAPPEDA Instansi terkait - Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan - Dinas PU - DPKKD - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi	0,1 M
		12. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	22.Perencanaan selesai paling lama 14 hari setelah ditetapkannya status darurat bencana	Instansi Utama : - BPBD - Bappeda Instansi terkait - Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi	0,1 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
				<ul style="list-style-type: none"> - PU - DPKKD - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga - Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Koperasi - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya 	
		13. Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana	23. Terselenggaranya Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi paling lama 6 bulan setelah kejadian bencana	Instansi Utama : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas PU - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan olah raga - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Instansi terkait <ul style="list-style-type: none"> - BPBD - Bappeda - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya 	5 M
		14. Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis	24. Normalisasi kehidupan masyarakat korban selamat paling lama 6 bulan setelah kejadian bencana	Instansi Utama : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan Instansi terkait <ul style="list-style-type: none"> - BPBD - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi - Instansi-instansi vertikal lainnya 	0,5 M

Matrik : Fokus Program dan Kegiatan Perlindungan Masyarakat Bencana Epidem / KLB

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
1.Pencegahan dan Mitigasi	1.Pembuatan Peta Rawan Bencana Epidem / KLB	1. Pengenalan dan pemetaan risiko bencana Wilayah /KLB sebagai Deteksi Dini	1.Tersedianya dokumen pemetaan wilayah rentan KLB setiap potensi kejadian	Instansi Utama: - Dinkes Instansi Terkait : - BPBD - RSU - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,1 M
	2.Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana Epidem melalui Promosi Kesehatan	2.Sosialisasi dan Publikasi tentang penyakit Menular dan Tidak Menular	2.Terbentuknya kader kesehatan desa terutama di bidang kesehatan dan pertolongan pertama sebanyak 7-8 orang perdesa di wilayah kabupaten Pidie Jaya. 3.Masyarakat mengetahui tentang penyakit Menular dan Tidak Menular 4. Tersedianya poster dan leaflet penyakit menular dan tidak penular masing-masing-masing sebanyak 2000 lembar.	Instansi Utama: - Dinas Kesehatan - BPBD Instansi Terkait : - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,5 M
		3.Pelatihan PHAST (Participatory Hygiene and Sanitation Tranformation)	5.Terbentuknya kader Promosi kesehatan bidang sanitasi dan air bersih sebanyak 7-8 orang perdesa yang ada	Instansi Utama: - Dinas Kesehatan - BPBD Instansi Terkait :	0,5 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
			di wilayah kabupaten Pidie Jaya. 6.Masyarakat memahami tentang pemanfaatan sanitasi dan pengelolaan air bersih	- instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	
		4.Pelatihan CHAST (Children Hygiene and Sanitation Training)	7.Meningkatan pengetahuan Guru dan siswa Sekolah dalam Kabupaten Pidie Jaya tentang kebersihan dan Sanitasi 8.Perubahan Prilaku Kebersihan dan Kesehatan terhadap Anak	Instansi Utama: - Dinas Kesehatan - BPBD Instansi Terkait : - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,5 M
2.Kesiapsiagaan	3.Peningkatan Kapasitas Evakuasi dan Penyelamatan Masyarakat di Zona Prioritas Epidem	5. Penyusunan dan Penetapan Rencana Evakuasi di Zona Prioritas Epidem	9.Tersusunnya dan ditetapkannya Rencana Evakuasi Epidem	Instansi Utama : - BPBD - Dinas Kesehatan Instansi terkait - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,05 M
		6.Penyediaan obat-obatan dan perbekalan Kesehatan.	10.Tersedianya obat-obatan dan perbekalan untuk melakukan evakuasi di daerah zona prioritas PB Epidem.	Instansi Utama : - Dinas Kesehatan - BPBD Instansi terkait - instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,2 M
	4.Pemantauan penyakit menular dan tidak menular	7.Melakukan Survey daerah rawan penyakit menular dan tidak	11.Terlaksananya pemantauan dini terhadap penyakit	Instansi Utama: - Dinas Kesehatan - BPBD	0,1 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
	di masyarakat.	menular yang bisa terjadi Endemi serta Prilaku Kesehatan masyarakat.	menular dan tidak menular di seluruh gampong dalam kabupaten Pidie Jaya	- Dinas Sosial Instansi Terkait : - instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	
		8.Melakukan Foging di daerah rawan penyakit menular yang di sebabkan oleh Vektor penyakit.	12.Masyarakat bebas dari vector Penyakit Menular	Instansi Utama: - Dinas Kesehatan Instansi Terkait : - instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,2 M
3. Penanganan Bencana	5. Tanggap Darurat	9.Kajian Cepat Bencana KLB	13.Ditetapkannya status darurat bencana berdasarkan kriteria dasar KLB	Instansi Utama : - BPBD - Dinas Kesehatan Instansi terkait : - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan - Dinas Pertanian THP - instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,1 M
		10.Pencarian, penyelamatan dan Karantina	14.Maksimum 3x24 jam setelah penetapan status KLB, seluruh penduduk terpapar di daerah karantina telah diidentifikasi tingkat keterpaparannya	Instansi Utama : - BPBD - Dinas Kesehatan - Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan - Dinas Pertanian THP Instansi terkait : - instansi-instansi lainnya	0,25 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
				dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	
		11.Pemenuhan kebutuhan dasar layanan kesehatan	15.Maksimum 1x24 jam setelah penetapan status KLB, logistik dasar pelayanan kesehatan telah sampai ke seluruh pusat penanganan KLB	Instansi Utama : - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial Instansi Pendukung - BPBD - RSUD - instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	1 M
		12.Pembentukan Posko Kesehatan untuk Menyediaan Logistik Obat-obatan dan Memberikan pelayanan bagi pengungsian dan masyarakat sekitar	16.Terbentuknya posko Pelayanan Kesehatan sehingga adanya penanganan terhadap masyarakat yang terkena penyakit menular. 17.Memutuskan rantai penularan penyakit .	Instansi Utama: - Dinkes - Rumah Sakit Umum Daerah - BPBD Instansi Pendukung - BPBD - RSUD - instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	2 M

Matrik : Fokus Program dan Kegiatan Perlindungan Masyarakat Bencana Angin Puting Beliung

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
1.Pencegahan dan Mitigasi	1.Pengembangan dan Publikasi Teknologi Pendeteksi angin Puting beliung	1. Pengembangan Inovasi Teknologi Untuk Deteksi Dini Potensi Bencana Puting Beliung	1. Terpetakannya daerah potensi ancaman puting beliung paling lama 1x24 jam sebelum kejadian bencana 2. Digunakannya jaringan informasi kebencanaan terpusat dalam penyebaran peringatan dini ancaman puting beliung. 3. Masyarakat mampu mengetahui tanda- tanda alam sebagai peringatan lokal kejadian PutingBeliung berdasarkan kearifan lokal yang ada.	Instansi Utama: - BPBD - Dishubkominfo Instansi Terkait : - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,3 M
2.Kesiapsiagaan	2.Sosialisasi tentang penyebab dan Mitigasi Bencana Angin Puting Beliung	2 .Penyusunan dan Penetapan Rencana Evakuasi	4. Tersusunnya rencana Evakuasi	Instansi Utama : - BPBD Instansi terkait - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,1 M
	3.Gladi dan Simulasi Evakuasi Bencana Angin Puting Beliung	3.Gladi Posko Berkala Prosedur Operasi Standar Penanganan Darurat Bencana Angin Puting Beliung	5.Satu kali setahun terselenggara gladi posko berdasarkan POS penanganan bencana Angin Puting Beliung	Instansi Utama : - BPBD Instansi terkait - instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - instansi-instansi vertikal lainnya	0,2 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
3. Penanganan Bencana	4. Tanggap Darurat	4.Pengkajian kerusakan dan kerugian	6. Maximum 3 hari setelah dikeluarkannya status darurat bencana telah dimiliki hasil perhitungan kerusakan dan kerugian (DALA).	Instansi Utama : - BPBD (TRC) Instansi terkait - instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,1 M
	5.Rehabilitasi dan Rekontruksi	5.Penyusunan rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi	7.Perencanaan selesai paling lama 5 hari setelah ditetapkannya status darurat bencana	Instansi Utama : - BPBD - Bappeda Instansi terkait - instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,1 M
		6.Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana	8.Terselenggaranya Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi paling lama 1 bulan setelah kejadian bencana	Instansi Utama : - Dinas PU - Dinas Sosial Instansi terkait - BPBD - Bappeda - instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	2 M

Matrik : Fokus Program dan Kegiatan Perlindungan Masyarakat Bencana Longsor

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
1.Pencegahan dan Mitigasi	1.Penegakan Aturan Terkait Pengurangan Risiko Bencana	1. Penegakan Peraturan Lingkungan Hidup terkait pencegahan bencana banjir dan longsor	1. Penindakan bagi aktifitas penebangan liar, termasuk pembakaran hutan dan aktivias perusakan lingkungan lainnya	Instansi Utama: - Bapedal - BPBD Instansi Terkait: - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	0,2 M
		2. Pengembangan inovasi teknologi untuk pencegahan bencana Longsor berdasarkan kajian risiko bencana	2. Adanya hasil penelitian tentang inovasi teknologi yang dilakukan pada kawasan berisiko longsor minimal 2 publikasi/tahun 3.Adanya Penerapan hasil teknologi terhadap pencegahan longsor	Instansi Utama: - Dinas PU - Dishutbun - Bapedal Instansi Terkait: - BPBD - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	0,3 M
	2.Pembangunan Infrastruktur peredam longsor	3. Pembuatan Talud Penahan Tanah	4.Terbangunnya talud sepanjang 1 km di daerah rawan longsor.	Instansi Utama: - Dinas PU Instansi Terkait: - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	0.8 M
		4. Penanaman Rumput / tanaman untuk Perkuatan tebing	5. Tertanamnya 1000 m2 rumput di tebing yang rawan longsor	Instansi Utama: - Dinas PU Instansi Terkait: - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah	0.5 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
				Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	
		5.Pelandaian / pemotongan Tebing	6.Terpotongnya 1000 m2 tebing yang rawan longsor	Instansi Utama: - Dinas PU Instansi Terkait: - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	0.7 M
		6. Pembuatan bangunan pengendali air permukaan dan air tanah pada daerah rawan longsor	7.Terbangun bangunan pengendali longsor	Instansi Utama: - Dinas PU Instansi Terkait: - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	1 M
2.Kesiapsiagaan	3.Peningkatan Kapasitas Evakuasi Masyarakat	7.Penyusunan dan Penetapan Rencana Evakuasi masyarakat di daerah rawan longsor	8.Tersusunnya Rencana Evakuasi	Instansi Utama : - BPBD Instansi terkait - instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,1 M
	4.Gladi dan Simulasi Sistem Peringatan Dini dan Evakuasi	8.Gladi Posko Berkala Prosedur Operasi Standar Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana	9. Satu kali setahun terselenggara gladi posko berdasarkan POS penanganan bencana	Instansi Utama : - BPBD Instansi terkait - instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,2 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
3. Penanganan Bencana	5. Tanggap Darurat	9.Kaji Cepat Bencana	10.Tersedianya hasil kajian cepat dan rekomendasi status darurat bencana maksimal 1x 24 jam sejak kejadian bencana	Instansi Utama : - BPBD (TRC) Instansi terkait : - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,2 M
		10.Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi	11.Maksimum 1x6 jam setelah kejadian bencana telah memulai pelaksanaan tugas 12.Maksimum 3x24 jam setelah kejadian bencana, telah selesai melakukan evakuasi semua korban selamat ke pusat kesehatan 13.Maksimum 7x24 jam setelah kejadian bencana, telah selesai melaksanakan penguburan seluruh jenazah	Instansi Utama : - BPBD Instansi terkait : - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi - Dinas PU - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,5 M
		11.Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi	14.Maksimum 2x24 jam setelah kejadian bencana, logistik dasar telah sampai ke seluruh titik pengungsian	Instansi Utama : - Dinas Sosial Instansi terkait - BPBD - Dinas Kesehatan - Dinas PU - Dishubkominfo - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	1 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
		12.Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis	15.Maksimum 1x24 jam setelah kejadian bencana, telah diketahui status seluruh fasilitas kritis yang ada di daerah bencana 16.Maksimum 7x24 jam setelah kejadian bencana, telah dapat memfungsikan fasilitas kritis yang rusak (baik secara permanen ataupun temporer).	Instansi Utama : - Dinas PU Instansi terkait - BPBD - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintahPidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	3 M
	6.Rehabilitasi dan Rekontruksi	13.Pengkajian Kerusakan dan Kerugian	17.Maksimal 10 hari setelah dikeluarkannya status darurat bencana telah dimiliki hasil perhitungan kerusakan dan kerugian (<i>Damage and Losses Assessment = DALA</i>).	Instansi Utama : - BPBD - BAPPEDA - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - Dinas Perhubungan - Dinas PU - Dishubkominfo Instansi terkait - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya	0,1 M
		14. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	18.Perencanaan selesai paling lama 14 hari setelah ditetapkan status darurat bencana	Instansi Utama : - BPBD - Bappeda - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - Dinas Perhubungan - Dinas PU - Dishubkominfo Instansi terkait	0,1 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
				- Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya	
		15. Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana	19. Terselenggaranya Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi paling lama 6 bulan setelah kejadian bencana	Instansi Utama : - Dinas PU - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan - Dishubkominfo Instansi terkait - BPBD - Bappeda - instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	5 M
		16. Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis	20. Normalisasi kehidupan masyarakat korban selamat paling lama 6 bulan setelah kejadian bencana	Instansi Utama : - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial Instansi terkait - BPBD - instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	2 M

Matrik : Fokus Program dan Kegiatan Perlindungan Masyarakat Bencana Abrasi

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
1. Pencegahan dan Mitigasi	1. Pembangunan Infrastruktur dan penegakan aturan PRB	1. Penegakan Peraturan Lingkungan Hidup terkait pencegahan abrasi/erosi	1. Tidak adanya pembangunan baru fasilitas publik di garis pantai 2. Tidak terdapatnya aktivitas penambangan galian C atau B yang dekat dengan pantai atau kawasan rawan abrasi	Instansi Utama: KLH Instansi Terkait: - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	0,1 M
		2. Pengembangan inovasi teknologi untuk pencegahan dan pemantauan potensi bencana abrasi berdasarkan kajian risiko bencana	3. Tersedianya alat pemantau sebagai inovasi teknologi baru untuk indikasi kejadian abrasi/akresi minimal di 3 sel pantai Zona Prioritas PRB Abrasi Pidie Jaya	Instansi Utama: - Dinas PU - KLH Instansi Terkait - BPBD - Bappeda - Dinas kelautan dan Perikanan - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	0,3 M
		3. Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Pada Daerah Rawan Abrasi	4. Terbangunnya Tanggul Penahan Ombak Sepanjang 2 Km di Gampong Pasir , Gampong Ujong Kalak, Gampong Suak Indrapuri	Instansi Utama: - Dinas PU Instansi Terkait: - Bappeda - BPBD - KLH	1 M
		4. Pengawasan Terhadap izin Pembangunan Pemukiman, Perumahan pada garis Pantai Prioritas Abrasi.	5. Tidak adanya lagi bangunan yang menyalahi fungsi kawasan.	Instansi Utama: - Dinas PU Instansi Terkait: - KP2TSP - Bappeda - BPBD - Satpol PP dan WH	0,1 M
	2. Reboisasi Pesisir Pantai di zona	5. Penanaman pohon sebagai buffer zone	6. Tertanamnya 10.000 Tanaman Ketapang,	Instansi Utama: - Dinas Kehutanan dan Perkebunan	0,2 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
	prioritas PB Abrasi Pidie Jaya	abrasi	Waru Laut dan Pandan.	Instansi Terkait: - Bappeda - BPBD - KLH	
2. Kesiapsiagaan	3. Peningkatan Kapasitas Evakuasi Masyarakat	6. Penyusunan dan Penetapan Rencana Evakuasi di daerah rawan abrasi	7. Tersedianya Prosedur Evakuasi	Instansi Utama: - BPBD Instansi Terkait: - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	0,1 M
3. Penanganan Bencana	4. Tanggap Darurat	7. Kajian Cepat Bencana Abrasi	8. Ditetapkannya status darurat bencana maksimal 1x3 jam sejak bencana selesai	Instansi Utama : - BPBD (TRC) Instansi terkait : - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Aceh	0,15 M
		8. Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi	9. Maksimum 1x24 jam setelah kejadian bencana selesai, logistik dasar telah sampai ke seluruh titik pengungsian	Instansi Utama : - Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Instansi terkait : - BPBD - Dinas Kesehatan - Dinas PU - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi	1 M
		9. Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis	10. Maksimum 1x24 jam setelah kejadian bencana selesai, telah diketahui status seluruh fasilitas kritis yang ada di daerah bencana	Instansi Utama : - Dinas PU Instansi terkait : - BPBD - Dinas Kesehatan - Dinas PU	3 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
			11. Maksimum 7x24 jam setelah kejadian bencana selesai, telah dapat memfungsikan fasilitas kritis yang rusak.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas PU - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga - Dinas Perindustrian dan Koperasi - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya 	
	5.Rehabilitasi dan Rekontruksi	10.Pengkajian Kerusakan dan Kerugian	12.Maksimal 10 hari setelah dikeluarkannya status darurat bencana telah dimiliki hasil perhitungan kerusakan dan kerugian (<i>Damage and Losess Assessment = DALA</i>).	Instansi Utama : <ul style="list-style-type: none"> - BPBD - BAPPEDA Instansi terkait <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan - Dinas PU - DPKKD - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi 	0,1 M
		11. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	13.Perencanaan selesai paling lama 14 hari setelah ditetapkan status darurat bencana	Instansi Utama : <ul style="list-style-type: none"> - BPBD - Bappeda Instansi terkait <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi - Dinas PU - DPKKD - Dinas Pendidikan, Kabudayaan, Pemuda dan Olah raga - Dinas Perindustrian dan Koperasi 	0,1 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
				<ul style="list-style-type: none"> - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya - Dinas Pertanian dan Peternakan - Dinas Perkebunan dan Kehutanan - Dinas Kelautan dan Perikanan - KLH 	
		12. Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana	14. Terselenggaranya Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi paling lama 6 bulan setelah kejadian bencana	Instansi Utama : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas PU - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan olah raga - Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Instansi terkait <ul style="list-style-type: none"> - BPBD - Bappeda - Instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya 	5 M

Matrik : Fokus Program dan Kegiatan Perlindungan Masyarakat Bencana Kekeringan

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
1.Pencegahan dan Mitigasi	1.Penegakan Aturan Terkait Pengurangan Risiko Bencana	1. Perkuatan Aturan Tata Ruang dan Pengembangan di Kawasan Domestik dan Industri	1.Terjaganya stabilitas kualitas dan kapasitas daerah serapan hutan kota dan jalur hijau	Instansi Utama: - Bappeda - KLH - Dinas Kehutanan dan Perkebunan Instansi Terkait - BPBD - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	0,1 M
		2. Penerapan Mekanisme Perizinan dan Pungutan Pajak bagi Pengambilan Air Tanah Dalam bagi Industri	2.Teridentifikasinya peningkatan pajak air tanah dalam dengan penambahan eksploitasi debit air tanah dalam tahunan.	Instansi Utama: - Distamben - Bapedal - Disperindagkop dan UKM Instansi Terkait : - BPBD - KP2TSP - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	0,05 M
		3. Pembangunan mekanisme kerjasama dengan perusahaan daerah untuk distribusi air bersih di daerah rentan	3. Adanya MOU antara perusahaan penyuplai air minum dan pemerintah tentang mekanisme penyuplaian air bersih pada kawasan yang dilanda kekeringan.	Instansi Utama: - BPBD - Dinas PU Instansi terkait : - Disperindagkop dan UKM - Dinas Kesehatan - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	0,02 M
	2. Pembangunan	4.Pembangunan bak-bak	4.Tersedianya 10 bak	Instansi Utama:	0,5 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
	Infrastruktur untuk mitigasi ancaman kekeringan	penampung air hujan di kawasan yang rawan kekeringan	penampung air	- Dinas PU Instansi terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	
		5.Pengembangan, pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan.	5.Teralirinya sawah sawah masyarakat	Instansi Utama: - Dinas PU Instansi terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	1 M
2.Kesiapsiagaan	3. Penataan Kawasan Ekonomii Strategis yang berbasis Mitigasi Bencana di semua Kecamatan	6. Peningkatan Ketahanan Pangan	6.Amanya mata pencaharian masyarakat serta tersedianya stock pangan.	Instansi Utama : - Bappeda - Distan Instansi terkait - instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - instansi-instansi vertikal lainya di wilayah Pidie Jaya	0,1 M
	4.Peningkatan Kapasitas Evakuasi Masyarakat	7. Penyusunan dan Penetapan Rencana Evakuasi di daerah rawan Kekeringan	7.Tersusunnya dan ditetapkannya Rencana Evakuasi Kekeringan	Instansi Utama : - BPBD Instansi terkait - instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - instansi-instansi vertikal lainya di wilayah Pidie Jaya	0,1 M
		8. Penyediaan kebutuhan logistik	8.Tersedianya logistik dan perbekalan untuk melakukan evakuasi	Instansi Utama : - BPBD - Dinas Sosial Dinas Kesehatan Instansi terkait	0,5 M

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	INSTANSI	PAGU INDIKATIF (Milyar)
				- instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	
3. Penanganan Bencana	5. Tanggap Darurat	9.Pemenuhan kebutuhan dasar layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi	9.Maksimum 1x6 jam setelah titik puncak kekeringan, Bantuan tanki air bersih portabel telah sampai diseluruh titik hidran umum yang telah ditetapkan	Instansi Utama : - Dinas Kesehatan - Dinas PU Instansi terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah Pidie Jaya - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Pidie Jaya	2 M
		10.Pengkajian kerusakan dan kerugian	10.Paling telat 3hari setelah dikeluarkannya status darurat bencana telah dimiliki hasil perhitungan kerusakan dan kerugian (<i>Damage and Losess Assessment = DALA</i>).	Instansi Utama : - BPBD - Bappeda Instansi terkait - instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	0,3 M
		11.Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis	11.Normalisasi kehidupan masyarakat korban kekeringan paling lama 1 bulan setelah kejadian bencana	Instansi Utama : - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial Instansi terkait - BPBD - RSUD - instansi-instansi lainnya dilingkungan pemerintah Pidie Jaya - instansi-instansi vertikal lainnya di wilayah Pidie Jaya	1 M

